

# Pemilihan Rektor Oleh Presiden

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

**Karena presiden memiliki menteri sebagai pembantunya, tidak seharusnya presiden terlibat langsung, apalagi menteri bekerja sesuai dengan keinginan presiden**

**W**acana Mendagri (Tjahyo Kumolo) mengusulkan pemilihan rektor melalui Keputusan Presiden harus disikapi secara

arif. Meskipun belum menjadi kebijakan, tetapi perlu direspons dengan pikiran logis. Sehingga tidak terkesan terburu-buru dipaksakan, apakah sudah saatnya campur tangan presiden dipertanyakan. Apakah kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila menyusup dalam Perguruan Tinggi (PT) di beberapa daerah sebagai target pengembangan radikalisme, sudah menjadi kerawanan sehingga pemilihan rektor menjadi domain presiden.

Pengangkatan dan pemberhentian rektor, sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) No. 19 tahun 2017. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan pemilihan dilakukan dengan ketentuan: (a) Menteri memiliki 35 persen hak suara dan total pemilihan yang hadir; dan (b) Senat memiliki 65 persen hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara sama.

Begitu pula pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan, diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015. Pada pasal 4 menjelaskan pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan: (a). Penaringan bakal calon (b). Pemberian pertimbangan (c). Penyeleksian; dan (d). Penetapan dan pengangkatan. Pasal 5 menjelaskan hasil pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dari senat disampaikan kepada Menteri. Pasal 6 ayat (1) dan (6) menegaskan Menteri membentuk Komisi Seleksi paling sedikit 7 orang dan Komisi Seleksi menyerahkan Calon Rektor/Ketua kepada Menteri paling banyak 3 orang. Dengan kata lain proses pengangkatan Rektor sebagaimana dijelaskan

oleh dua regulasi di atas, menjadi domain kedua Kementerian (Menristekdikti-Menag) dengan mekanisme berbeda.

Dalam dunia akademisi, posisi rektor cukup strategis dan bergengsi. Posisi rektor dapat disetarakan dengan kepala daerah (gubernur). Perbedaan hanya terlihat, rektor memimpin institusi pendidikan, sedangkan kepala daerah wakil pemerintahan pusat di provinsi. Kedua rektor semaksimal mungkin, manakala dikorelasikan dengan tujuan PT itu sendiri, yakni: (1). Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (2). Mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kopepatif melalui pelaksanaan Tindakan; dan (3). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4). Dengan fungsi ini terlihat pekerjaan dan tanggung jawab Rektor cukup berat dan penting. Artinya di tangan Rektorlah terben-tuknya peradaban bangsa bermartabat, pengembangan sivitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kekhawatiran tumbuh dan berkembangnya aliran radikal di PT, sesuatu harus diantisipasi sedini mungkin. Karena dipandang membahayakan negara apalagi dapat menyentuh PT, dimana PT sebagai tempat membentuk peradaban bangsa bermartabat dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama pada fakultas-fakultas strategis seperti fakultas WIPA di dalamnya terdapat jurusan kimia. Kemampuan, keahlian mengembangkan ilmu kimia dan keahlian perakitan bom menjadi kekuatan penting kelompok radikal. Jika calon-calon sarjana

kimia ini lebih dahulu tertanam pikiran-pikiran radikal, sudah pasti membahayakan negara dan bangsa. Atas dasar itu, kegelisahan Presiden harus dipandang sebagai suatu dimak-lumi, pemerintah tidak menginginkan, seha-rusnya PT berfungsi sebagai pusat per-bangunan peradaban bangsa dan ilmu penge-tahuan, justru menjadi sarang tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal.

Keinginan adanya pelibatan presiden dalam pengangkatan Rektor, dapat dilihat dalam beberapa prinsip. Pertama, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerinta-han. Selaku kepala negara dan kepala pemerin-tahan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keamanan negara, masa depan pendidikan anak bangsa dan kemartabatan negara sebagaimana substansi dari fungsi PT itu sendiri. Kedua, PT merupakan tempat penggodokan pendidikan anak bangsa. Keterjaminan kualitas generasi bangsa ini ditentukan oleh PT berkualitas.

Jika tidak diawasi secara ketat dan dikelola secara baik, PT akan mudah disusup dengan radikalisme. Maka dengan sendirinya fungsi PT akan berubah tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa. Ketiga, adanya keterlibatan Presiden dalam pengangkatan rektor, merupakan bentuk dari keseriusan negara membasmi radikalisme dan dampak negatif dari aliran radikal atau bentuk ancaman lainnya. Agar berbeda pemahaman jika ini bagian dari politisasi kampus. Jika berbicara politisasi kampus, sebenarnya keterlibatan Menteri dalam pengangkatan rektor selama ini, juga merupakan bentuk dari politisasi kampus. Hal ini berbeda jauh dengan peraturan sebelumnya, dimana proses penaringan dan pengangkatan rektor dilakukan melalui senat di PTN dan PTM yang bersangkutan.

## Keterlibatan Tidak Langsung

Karena presiden memiliki menteri sebagai pembantunya, tidak seharusnya presiden terlibat langsung karena eksistensi menteri perlu penguatan tangan presiden, apalagi menteri bekerja sesuai dengan keinginan presiden. Keterlibatan presiden harus ditempatkan pada keterlibatan tidak langsung. Bisa saja dalam bentuk pelaporan hasil dari proses

pengangkatan rektor atau petunjuk dari presiden dibutuhkan setiap proses pengang-katan rektor. Mungkin mekanisme seperti ini yang harus dipertanyakan, sehingga setiap proses pengangkatan rektor benar-benar diketahui oleh presiden. Di samping menteri dapat mendorong rektor setiap PT untuk mengawa-si, mengantisipasi kemunculan radikalisme di PT-nya. Jika PT tersebut kecolongan dite-mukannya kembali radikalisme, maka dengan sendirinya rektor harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Mengantisipasi tumbuh dan berkem-bangya kelompok radikal di PT, perlu diper-tuk lembaga TRPT, langsung diketahui oleh rektor dengan melibatkan pimpinan fakultas, dosen dan pimpinan mahasiswa. Tujuannya untuk mengidentifikasi sedini mungkin kehadiran radikalisme dan mengantisipasi-nya. Setiap semester rektor harus melaporkan kepada menteri tentang perkembangan PT-nya secara khusus terkait dengan radikalisme. Kehadiran lembaga ini dipandang lebih strategis meskipun setiap daerah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Forum Koordinasi Pencegah Terorisme (FKPT) yang belum tentu menja-mah ke wilayah PT secara langsung. Berbeda halnya dengan TRPT karena ia di dalam, maka gerakannya lebih cepat dan tepat men-baca lapangan.

## Penutup

Kita sepakat radikalisme adalah kejahatan luar biasa, dapat mengancam disintegrasi bangsa. Juga bertanggung jawab pada stabilitas ekonomi dan politik negara. PT dapat menjadi lahan strategis tumbuh dan berkembangnya radikalisme. Maka sosok Rektor sangat dibu-tuhkan guna mengawasi - mengantisipasi sedini mungkin kemunculan radikalisme di tubuh PT-nya sendiri. Jika komitmen ini diw-ujudkan Rektor akan turut membantu keseti-rasan pemerintah memberantas radikalisme, maka Rektor tidak harus menjadi pilihan Presiden langsung.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana (S.3) UIN SU, Dan Ketua Majelis Pembina Cabang Perguruan Mahasiswa Islam Indonesia Medan.